

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

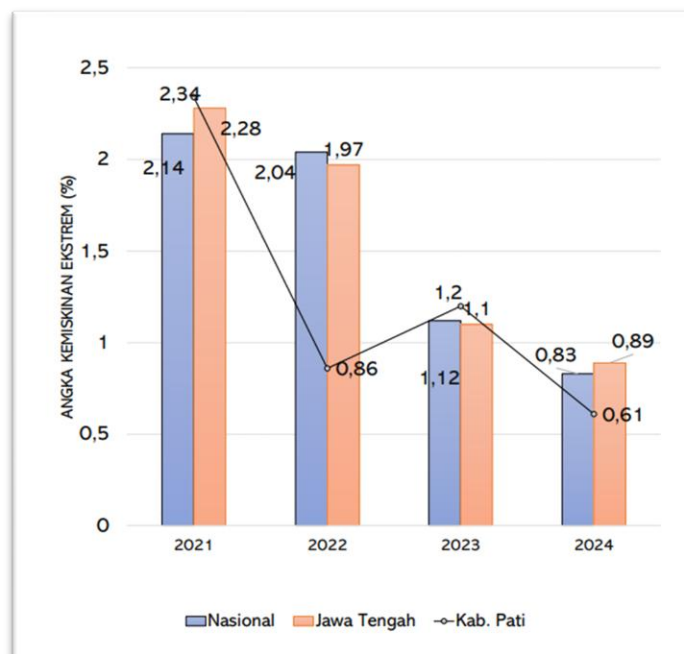
Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan secara layak, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun akses terhadap layanan publik. Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut atau ekstrem. Kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi individu yang hidup di bawah garis kemiskinan minimum, yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal secara berkelanjutan. Dalam konteks global, kemiskinan ekstrem diukur berdasarkan standar pengeluaran di bawah US\$1,9 *Purchasing Power Parity* (PPP) per hari (World Bank, 2011), yang tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan eksklusi sosial, keterbatasan akses layanan dasar, serta kerentanan multidimensional (UNDP, 2022).

Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi agenda strategis nasional di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan ini menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran berbasis data terpadu sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam konteks ini, kualitas pengelolaan data menjadi elemen krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan, karena

ketidaktepatan data akan berdampak langsung pada ketidaktepatan sasaran intervensi.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk besar masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem relatif tinggi adalah Kabupaten Pati. Berdasarkan data Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2023, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 10.860 jiwa (0,86%), yang kemudian diverifikasi melalui musyawarah desa menjadi 10.247 jiwa, dan selanjutnya mengalami penurunan signifikan menjadi 3.659 jiwa setelah proses verifikasi lanjutan oleh perangkat daerah.

Gambar 1.1 Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Pati 2021-2024



Sumber: Bapperida Kabupaten Pati, 2024.

Dalam grafik tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati pada tahun 2023 lebih tinggi dari Nasional dan Jawa Tengah. Data 10.247 jiwa yang sudah diverifikasi dan validasi melalui musyawarah desa ditetapkan sebagai data awal pensasaran kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Selanjutnya data awal pensasaran tersebut diverifikasi dan validasi kembali oleh Bapperida serta perangkat daerah pendamping didapatkan hasil 3.659 jiwa dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati.

Tabel 1.1 Kondisi data kemiskinan ekstrem dan perangkat daerah pendamping di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Data Awal Pensasaran	Data setelah Verval	Perangkat Daerah
1	Winong	30	146	51	Inspektorat & DPMPTSP
2	Juwana	29	467	98	BPKAD & Dinas Perhubungan
3	Pati	24	554	305	Setwan & Dinkop UMKM
4	Gabus	24	213	96	Diskominfo & Disdukcapil
5	Jakenan	23	192	19	BKPP & Dinas Kesehatan
6	Margoyoso	22	1.089	137	Setda & Bakesbangpol
7	Tayu	21	968	512	Disnaker & BPBD
8	Jaken	21	312	75	Dispermades

9	Pucakwangi	20	500	214	DPUTR
10	Margorejo	18	337	258	DLH
11	Wedarijaksa	18	590	461	Dinporapar
12	Batangan	18	171	84	Dinas Ketapang
13	Tambakromo	18	237	48	Dinas Pertanian
14	Kayen	17	647	112	Bapperida
15	Sukolilo	16	794	91	Dinsos P3AKB
16	Trangkil	16	829	84	Satpol PP
17	Tlogowungu	15	581	229	Disperkim
18	Gunungwungkal	15	318	193	Disdagperin
19	Cluwak	13	435	54	Disdikbud
20	Dukuhseti	12	575	313	DKP
21	Gembong	11	292	225	Dinarpus
			10.247	3.659	

Sumber: Bapperida Kabupaten Pati, 2024.

Perubahan data yang cukup drastis tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem, terutama terkait validitas, konsistensi, dan integrasi data antarinstansi. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Pati untuk mengembangkan inovasi kebijakan berbasis digital melalui aplikasi *SIAPKE PATI* (Sistem Informasi dan Aplikasi Pemantauan Kemiskinan Ekstrem Pati) sebagai upaya untuk meningkatkan akurasi data, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mendukung monitoring intervensi bantuan sosial secara terintegrasi.

Secara konseptual, pengembangan aplikasi *SIAPKE PATI* merepresentasikan upaya transformasi digital dalam tata kelola kebijakan publik,

khususnya dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem berbasis *by name by address*. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perangkat daerah, dan mitra pembangunan.

Namun demikian, dalam praktiknya, inovasi kebijakan digital tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang dirancang. Kebijakan berbasis teknologi informasi seringkali menghadapi persoalan mendasar yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan desain kebijakan itu sendiri, seperti lemahnya dasar regulasi, tidak jelasnya mekanisme operasional, rendahnya integrasi antar sistem, serta ketidaksesuaian antara instrumen kebijakan dan kebutuhan riil di lapangan. Dalam hal ini, kegagalan kebijakan tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan implementasi, tetapi juga dapat berasal dari kelemahan pada tahap perancangan kebijakan (*policy design*).

Dalam kasus aplikasi *SIAPKE PATI*, berbagai indikasi menunjukkan bahwa kebijakan ini menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaannya, seperti belum adanya regulasi khusus yang mengikat, tidak optimalnya pemanfaatan aplikasi oleh perangkat daerah, serta tidak berkelanjutannya penggunaan aplikasi akibat perubahan kebijakan nasional menuju sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirancang dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, analisis terhadap aplikasi *SIAPKE PATI* menjadi penting untuk memahami tidak hanya bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, tetapi juga mengapa kebijakan tersebut tidak mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif *policy design failure* dari B. Guy Peters untuk menganalisis kegagalan kebijakan secara komprehensif, baik pada aspek instrumen kebijakan (*policy failure*), tata kelola (*governance failure*), maupun kapasitas negara dalam konteks fragmentasi kebijakan (*state failure*).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan optimal sebagai instrumen dalam mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati, serta mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan optimal sebagai instrumen penanganan kemiskinan ekstrem?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan optimal sebagai instrumen dalam penanganan kemiskinan ekstrem

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam analisis kebijakan publik berbasis *policy design failure* sebagaimana dikemukakan oleh B. Guy Peters. Penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai inovasi kebijakan digital dalam penanganan kemiskinan ekstrem, tetapi juga memberikan pemahaman konseptual mengenai bagaimana kegagalan desain kebijakan dapat terjadi akibat ketidaktepatan instrumen, lemahnya tata kelola, serta tidak terintegrasinya kebijakan dengan sistem yang lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kritis bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merancang dan mengembangkan kebijakan berbasis digital, khususnya dalam

pengelolaan data kemiskinan dan pendistribusian bantuan sosial. Temuan penelitian ini dapat memberikan masukan terkait pentingnya kesesuaian antara desain kebijakan, dasar regulasi, mekanisme operasional, serta integrasi sistem kebijakan agar inovasi yang dikembangkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman empiris dan penguatan kapasitas analitis bagi peneliti dalam memahami dinamika kebijakan publik, khususnya dalam menganalisis kegagalan kebijakan berbasis digital. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengaitkan antara kerangka teori dan temuan lapangan secara lebih komprehensif.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tata kelola kebijakan yang tepat dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan inovasi digital, tetapi juga oleh kualitas desain kebijakan, akurasi data, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan.

1.5 Literatur Review

1.5.1 Penelitian Terdahulu

1. Fairuz Alia Ramadhanty. (2020). “Skripsi Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Aplikasi *Simnangkis KISSME* (Kolom Informasi keSejahteraan Sosial Masyarakat secara Elektronik) di Kota Magelang)”

Penelitian yang dilakukan oleh Fairuz Alia Ramadhanty (2020) berjudul “Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Aplikasi *Simnangkis KISSME* di Kota Magelang)” mengkaji pemanfaatan aplikasi digital sebagai inovasi pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis teori difusi inovasi dari Rogers, yang menitikberatkan pada karakteristik inovasi seperti *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *Simnangkis KISSME* mampu meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta menyediakan data kesejahteraan sosial yang lebih mudah diakses. Namun demikian, efektivitas aplikasi masih menghadapi kendala, terutama terkait pembaruan data, keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi.

Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan peran inovasi digital dalam tata kelola data kemiskinan, pendekatan analisis yang digunakan masih berfokus pada aspek keberhasilan inovasi dan belum secara mendalam mengkaji potensi kegagalan kebijakan sebagai akibat dari kelemahan desain kebijakan itu sendiri. Dalam perspektif *policy design failure* sebagaimana dikemukakan oleh B. Guy Peters, keterbatasan dalam pembaruan data, integrasi sistem, dan sosialisasi sebenarnya dapat dipahami sebagai indikasi awal dari kegagalan desain kebijakan, khususnya pada aspek instrumen dan tata kelola kebijakan.

Berbeda dengan penelitian Ramadhanty, penelitian ini tidak hanya berfokus pada peran aplikasi sebagai inovasi digital, tetapi juga menganalisis secara kritis mengapa aplikasi tersebut tidak selalu mampu berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan. Dalam konteks aplikasi *SIAPKE PATI*, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kelemahan desain kebijakan, seperti tidak adanya dasar regulasi yang kuat, lemahnya mekanisme operasional, serta ketidaksinkronan dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini mengisi research gap dengan menggeser fokus analisis dari sekadar keberhasilan inovasi menuju evaluasi kegagalan kebijakan digital dalam pengelolaan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas konteks kajian dengan menempatkan aplikasi digital tidak hanya sebagai alat pendukung informasi, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang seharusnya mampu memengaruhi ketepatan sasaran dan efektivitas distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kegagalan kebijakan publik berbasis digital, sekaligus memperkaya literatur mengenai tantangan implementasi inovasi kebijakan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah.

**2. Dini Silvi Purnia, Syaifur Rahmatullah, & Achmad Rifai. (2019).
Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis
Mobile Pada Dinas Sosial**

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Silvi Purnia, Syaifur Rahmatullah, dan Achmad Rifai (2019) berjudul “Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile pada Dinas Sosial” mengkaji pengembangan aplikasi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD), yang menekankan pada proses pengembangan aplikasi secara cepat melalui tahapan perancangan, pengujian, serta umpan balik pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi berbasis mobile tersebut mampu meningkatkan efektivitas pemantauan aktivitas lembaga sosial,

mempercepat pelaporan, serta memperkuat transparansi dalam distribusi bantuan sosial. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur interaksi antara masyarakat dan Dinas Sosial, sehingga memperluas akses layanan publik.

Meskipun penelitian ini menunjukkan keberhasilan aplikasi dalam meningkatkan aspek transparansi dan efisiensi administratif, fokus analisis masih terbatas pada dimensi teknis dan fungsional aplikasi, tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan antara desain kebijakan dan efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Dalam perspektif *policy design failure* sebagaimana dikemukakan oleh B. Guy Peters, keberhasilan teknis suatu aplikasi tidak secara otomatis mencerminkan keberhasilan kebijakan secara substantif. Ketiadaan analisis mengenai kesesuaian antara instrumen kebijakan (aplikasi digital) dengan tujuan kebijakan (pengentasan kemiskinan) menunjukkan adanya keterbatasan dalam melihat kebijakan sebagai satu kesatuan sistem yang utuh.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai fungsi teknis aplikasi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga mengkaji secara kritis apakah aplikasi digital benar-benar berfungsi sebagai instrumen kebijakan dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks aplikasi *SIAPKE PATI*, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan transparansi dan efisiensi, tetapi juga menyangkut aspek fundamental dalam desain kebijakan, seperti validitas data,

mekanisme verifikasi, integrasi antarinstansi, serta keberlanjutan kebijakan dalam menghadapi perubahan sistem nasional. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan aplikasi digital bukan sekadar sebagai sistem teknologi, melainkan sebagai bagian dari instrumen kebijakan yang harus dinilai efektivitasnya secara substantif.

Research gap yang diidentifikasi menunjukkan bahwa penelitian Purnia et al. lebih berfokus pada optimalisasi pengelolaan bantuan sosial dari sisi teknis dan transparansi lembaga, sementara penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai kegagalan desain kebijakan digital dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana ketidaktepatan desain kebijakan, lemahnya integrasi sistem, serta keterbatasan tata kelola dapat menyebabkan kebijakan berbasis aplikasi tidak mampu berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara inovasi digital dan kegagalan kebijakan publik di tingkat daerah.

3. Diva Cantika, & Harapan Tua RFS. (2021). Element Sukses Pelaksanaan *E-Government* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Penelitian yang dilakukan oleh Diva Cantika dan Harapan Tua RFS (2021) berjudul “Elemen Sukses Pelaksanaan *E-Government* dalam

Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru” mengkaji penerapan teknologi *e-government* melalui aplikasi “Sitanjak Makin Mantap” dalam mendukung penanganan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis elemen sukses *e-government* dari Indrajit, yang mencakup aspek *support*, *capacity*, dan *value*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi tersebut mampu mendukung penyediaan database kemiskinan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan sosial.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya berbagai keterbatasan, seperti sosialisasi yang belum berkelanjutan, ketimpangan infrastruktur jaringan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi. Meskipun penelitian ini menekankan pada faktor-faktor keberhasilan implementasi *e-government*, pendekatan yang digunakan cenderung normatif dan berorientasi pada identifikasi elemen sukses, sehingga belum secara mendalam mengkaji potensi kegagalan kebijakan yang muncul akibat kelemahan desain kebijakan itu sendiri.

Dalam perspektif *policy design failure* sebagaimana dikemukakan oleh B. Guy Peters, berbagai kendala seperti keterbatasan akses, lemahnya sosialisasi, serta ketidaksiapan infrastruktur tidak hanya dapat dipahami sebagai hambatan implementasi, tetapi juga sebagai indikasi ketidaktepatan desain kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan

e-government tidak hanya ditentukan oleh keberadaan elemen pendukung, tetapi juga oleh kesesuaian antara desain kebijakan, konteks sosial, serta kapasitas pengguna dalam memanfaatkan teknologi yang dikembangkan.

Berbeda dengan penelitian Cantika dan Harapan yang berfokus pada identifikasi elemen keberhasilan *e-government*, penelitian ini mengkaji secara lebih kritis bagaimana kebijakan berbasis aplikasi digital dapat mengalami kegagalan ketika tidak dirancang secara komprehensif. Dalam konteks aplikasi *SIAPKE PATI*, permasalahan yang muncul tidak hanya terkait dengan dukungan sumber daya atau infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih fundamental, seperti tidak adanya regulasi yang mengikat, lemahnya integrasi antarinstansi, serta ketidaksesuaian antara fungsi aplikasi dan kebutuhan riil dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Research gap yang diidentifikasi menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada faktor-faktor keberhasilan *e-government*, sementara penelitian ini menggeser fokus analisis pada kegagalan desain kebijakan digital dalam konteks penanganan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana kebijakan berbasis aplikasi tidak hanya dinilai dari keberhasilan implementasinya, tetapi juga dari kemampuannya sebagai instrumen kebijakan dalam mencapai tujuan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

lebih mendalam dalam memahami hubungan antara inovasi digital, tata kelola kebijakan, dan kegagalan kebijakan publik di tingkat daerah.

4. Nur Handayani, dkk. (2023). *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Handayani dkk. (2023) berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur” mengkaji peran kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan melalui pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori Ansell dan Gash (2007), yang menekankan pada empat komponen utama, yaitu kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme kolaborasi telah terbentuk melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi, perbedaan persepsi antarinstansi, serta ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya terletak pada kurangnya kolaborasi, tetapi juga pada kelemahan dalam desain kebijakan yang mengatur mekanisme koordinasi dan integrasi data. Dalam perspektif

policy design failure sebagaimana dikemukakan oleh B. Guy Peters, ketidaksinkronan data dan lemahnya koordinasi antarinstansi dapat dipahami sebagai kegagalan pada aspek tata kelola kebijakan (*governance failure*), yang menunjukkan bahwa kebijakan tidak dirancang secara terintegrasi dan adaptif terhadap kompleksitas aktor yang terlibat.

Meskipun penelitian Handayani et al. memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan, fokus analisis masih terbatas pada aspek interaksi antar aktor dan belum mengkaji secara mendalam peran instrumen kebijakan, khususnya teknologi digital, dalam mengatasi permasalahan struktural seperti validitas data dan efektivitas distribusi bantuan. Dengan kata lain, penelitian tersebut belum menempatkan inovasi kebijakan sebagai variabel kunci dalam memperbaiki kelemahan tata kelola yang ada.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif bagaimana kebijakan berbasis aplikasi digital, yaitu *SIAPKE PATI*, dirancang sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan mendasar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, khususnya terkait integrasi data, verifikasi penerima bantuan, dan koordinasi antar perangkat daerah. Namun, alih-alih hanya menilai potensi keberhasilan inovasi tersebut, penelitian ini juga menganalisis secara kritis bagaimana kelemahan desain kebijakan seperti tidak adanya regulasi yang mengikat, lemahnya mekanisme koordinasi, serta ketidaksinkronan

dengan sistem nasional justru dapat menyebabkan kebijakan tidak berfungsi secara optimal.

Research gap yang diidentifikasi menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek kolaborasi antar aktor, sementara penelitian ini menggeser fokus pada bagaimana desain kebijakan, khususnya melalui instrumen digital, dapat mengalami kegagalan dalam mengintegrasikan aktor, data, dan mekanisme distribusi bantuan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara tata kelola kolaboratif, inovasi digital, dan kegagalan kebijakan publik dalam konteks penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah.

5. Ade Putra Kurniawan Nugroho. (2017). Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Aplikasi “Madani Sinangkis” di Kota Serang)

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Putra Kurniawan Nugroho (2017) berjudul “Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Aplikasi ‘Madani Sinangkis’ di Kota Serang)” mengkaji pemanfaatan aplikasi digital sebagai inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

aplikasi “*Madani Sinangkis*” mampu menyediakan sistem informasi kemiskinan yang terintegrasi, termasuk data individu, rumah tangga, dan peta kemiskinan, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan kebijakan.

Namun demikian, implementasi aplikasi tersebut belum berjalan optimal karena berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan program yang terintegrasi dalam sistem. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi inovasi teknologi dengan realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam perspektif *policy design failure* sebagaimana dikemukakan oleh B. Guy Peters, berbagai kendala tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan implementasi, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam desain kebijakan, khususnya pada aspek instrumen dan tata kelola. Ketidaksiapan koordinasi lintas instansi serta lemahnya mekanisme sosialisasi menunjukkan bahwa kebijakan tidak dirancang secara komprehensif untuk memastikan keterlibatan seluruh aktor dan pengguna kebijakan. Dengan demikian, inovasi digital yang dikembangkan tidak sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Berbeda dengan penelitian Nugroho yang lebih menekankan pada potensi dan manfaat inovasi teknologi, penelitian ini mengkaji secara lebih

kritis bagaimana kebijakan berbasis aplikasi digital dapat mengalami kegagalan ketika tidak didukung oleh desain kebijakan yang kuat. Dalam konteks aplikasi *SIAPKE PATI*, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan koordinasi dan sosialisasi, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih mendasar, seperti tidak adanya regulasi yang mengikat, lemahnya integrasi data, serta tidak berkelanjutannya penggunaan aplikasi akibat perubahan kebijakan nasional.

Research gap yang diidentifikasi menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih berfokus pada deskripsi inovasi dan kendala implementasi, tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara desain kebijakan dan kegagalan kebijakan digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana ketidaktepatan desain kebijakan, keterbatasan tata kelola, serta ketidaksinkronan sistem dapat menyebabkan inovasi digital tidak mampu berfungsi secara optimal dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika kegagalan kebijakan publik berbasis teknologi informasi di tingkat daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai inovasi kebijakan berbasis teknologi informasi dalam penanggulangan kemiskinan cenderung berfokus pada aspek keberhasilan, seperti peningkatan transparansi, efisiensi administrasi, serta kemudahan akses data dan layanan bantuan sosial.

Penelitian Ramadhanty (2020), Purnia et al. (2019), dan Nugroho (2017) menekankan peran aplikasi dalam mendukung pengelolaan data dan distribusi bantuan, sementara Cantika dan Harapan (2021) serta Handayani et al. (2023) menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan, kapasitas sumber daya, dan kolaborasi antar aktor dalam keberhasilan kebijakan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat *success-oriented* dan belum secara mendalam mengkaji kegagalan kebijakan yang disebabkan oleh kelemahan desain kebijakan itu sendiri. Berbagai permasalahan seperti ketidaksinkronan data, lemahnya koordinasi, dan rendahnya pemanfaatan aplikasi cenderung diposisikan sebagai kendala implementasi, bukan sebagai indikasi kegagalan desain kebijakan. Dalam perspektif *policy design failure* dari B. Guy Peters, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya ketidaktepatan instrumen kebijakan, lemahnya tata kelola, serta tidak terintegrasinya kebijakan dalam sistem yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan mengkaji secara kritis kegagalan desain kebijakan digital melalui analisis aplikasi *SIAPKE PATI*. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga mengapa kebijakan tersebut tidak mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen dalam penanganan kemiskinan ekstrem, melalui pendekatan *policy failure*, *governance failure*, dan *state failure*.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori *Policy Design Failure*

Penelitian ini menggunakan teori *policy design failure* yang dikemukakan oleh B. Guy Peters sebagai kerangka analisis untuk memahami pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial melalui aplikasi *SIAPKE PATI*. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan tidak hanya bagaimana kebijakan diimplementasikan, tetapi juga mengidentifikasi sumber-sumber kegagalan kebijakan secara lebih komprehensif, baik yang bersumber dari desain kebijakan, proses implementasi, maupun sistem tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam studi implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa teori yang umum digunakan, seperti teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) dan Merilee S. Grindle (1980). Edwards III menekankan empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Grindle (1980) mengkaji implementasi kebijakan melalui dua dimensi utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi), yang mencakup aktor, kepentingan, serta kondisi sosial politik.

Meskipun kedua teori tersebut relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, keduanya cenderung berorientasi pada keberhasilan implementasi dan belum secara eksplisit menempatkan kegagalan kebijakan sebagai fokus utama analisis. Dalam konteks penelitian ini,

yang tidak hanya mengkaji pelaksanaan kebijakan tetapi juga mengidentifikasi kelemahan dan hambatan implementasi, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan kegagalan kebijakan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, teori *policy design failure* dari Peters dipilih karena mampu mengaitkan kegagalan kebijakan dengan kondisi tata kelola pemerintahan secara sistemik.

Menurut Peters (2015), kegagalan kebijakan tidak selalu berdiri sendiri, melainkan sering kali merupakan bagian dari kegagalan yang lebih luas dalam sistem pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan:

“Any specific policy failure may be only a symptom of a broader failure in governing.” (Peters, 2015)

Berdasarkan pandangan tersebut, Peters mengklasifikasikan kegagalan dalam sektor publik ke dalam tiga bentuk utama, yaitu *policy failure*, *governance failure*, dan *state failure*.

Pertama, *policy failure* merupakan kegagalan pada tingkat kebijakan atau program tertentu. Kegagalan ini terjadi ketika kebijakan tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau menghasilkan dampak yang tidak diharapkan. *Policy failure* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti desain kebijakan yang tidak tepat, ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan, keterbatasan sumber daya, maupun lemahnya implementasi. Namun, dalam perspektif Peters, kegagalan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konteks tata kelola yang lebih luas. Dengan kata lain, kegagalan suatu kebijakan sering kali merupakan refleksi dari kegagalan sistemik dalam pemerintahan.

Kedua, *governance failure* merujuk pada ketidakmampuan sistem pemerintahan dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan kebijakan secara efektif. Berbeda dengan *state failure*, dalam kondisi ini negara masih berfungsi, tetapi tidak mampu menjalankan peran koordinatifnya secara optimal. Peters membagi *governance failure* ke dalam dua bentuk utama. Pertama, kegagalan dalam memberikan arah kebijakan (*failure of direction*), yaitu ketika pemerintah tidak mampu merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan publik secara menyeluruh. Kedua, kegagalan koordinasi (*failure of coordination*), yaitu ketika berbagai aktor dan instansi pemerintah tidak mampu bekerja secara terintegrasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat sektoral dan tidak saling mendukung.

Kegagalan koordinasi ini sering terjadi dalam kebijakan yang bersifat lintas sektor, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, yang melibatkan banyak perangkat daerah dengan kewenangan yang berbeda. Akibatnya, meskipun masing-masing instansi dapat menjalankan programnya dengan baik, secara keseluruhan kebijakan tidak mampu memberikan dampak yang optimal karena kurangnya integrasi dan sinergi antar aktor.

Ketiga, *state failure* merupakan bentuk kegagalan paling mendasar dalam sektor publik, yaitu ketika negara tidak mampu menjalankan fungsi utamanya, seperti menjaga ketertiban, menyediakan layanan dasar, dan menjamin hak-hak masyarakat. Dalam kondisi ini, negara kehilangan kapasitasnya sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga fungsi-fungsi publik dapat

diambil alih oleh aktor lain seperti kelompok sosial, organisasi non-negara, atau bahkan aktor informal. *State failure* umumnya terjadi dalam konteks negara dengan konflik tinggi, kemiskinan ekstrem, atau kelemahan institusional yang sangat serius. Dalam penelitian ini, kondisi *state failure* tidak menjadi fokus utama karena Pemerintah Kabupaten Pati masih memiliki kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Selain itu, Peters juga menekankan bahwa kebijakan publik sering kali bersifat terfragmentasi (*policy fragmentation*), di mana masing-masing instansi bekerja dalam “sektor” atau silo sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kebijakan tidak terintegrasi dan sulit mencapai tujuan yang bersifat kompleks dan multidimensional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam konteks penelitian ini, aplikasi *SIAPKE PATI* sebagai inovasi kebijakan berbasis digital dirancang untuk mengatasi permasalahan fragmentasi data dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum optimalnya pemanfaatan aplikasi oleh perangkat daerah, keterbatasan pemutakhiran data, serta lemahnya konsistensi koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan perspektif Peters, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan implementasi *SIAPKE PATI* tidak hanya dapat dipahami sebagai *policy failure* pada tingkat aplikasi, tetapi juga sebagai bagian dari *governance*

failure, khususnya dalam aspek koordinasi dan integrasi kebijakan antar perangkat daerah. Dengan demikian, teori *policy failure* memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami tidak hanya gejala kegagalan kebijakan, tetapi juga akar permasalahan yang bersifat sistemik dalam tata kelola pemerintahan.

1.7 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara kerangka teori dan temuan empiris sehingga analisis yang dihasilkan bersifat eksplanatif. Pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dimaknai sebagai proses implementasi sistem digital dalam membantu pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati. Pada aspek pengelolaan data, indikator yang digunakan meliputi integrasi data dari berbagai sumber, mekanisme verifikasi dan validasi, penginputan data berbasis *by name by address*, serta tingkat pemanfaatan aplikasi dalam pengolahan dan pemutakhiran data. Sementara itu, pada aspek pendistribusian bantuan sosial, indikator meliputi penggunaan data sebagai dasar penentuan sasaran, pencatatan dan monitoring intervensi, ketersediaan dokumentasi bantuan, serta kesesuaian antara data dan realisasi di lapangan.

Konsep *policy design failure* dalam penelitian ini mengacu pada kerangka B. Guy Peters yang mencakup tiga dimensi, yaitu *policy failure*, *governance failure*, dan *state failure*. *Policy failure* dioperasionalkan melalui kesesuaian antara tujuan kebijakan dan instrumen, peran aplikasi dalam proses inti, serta kontribusinya

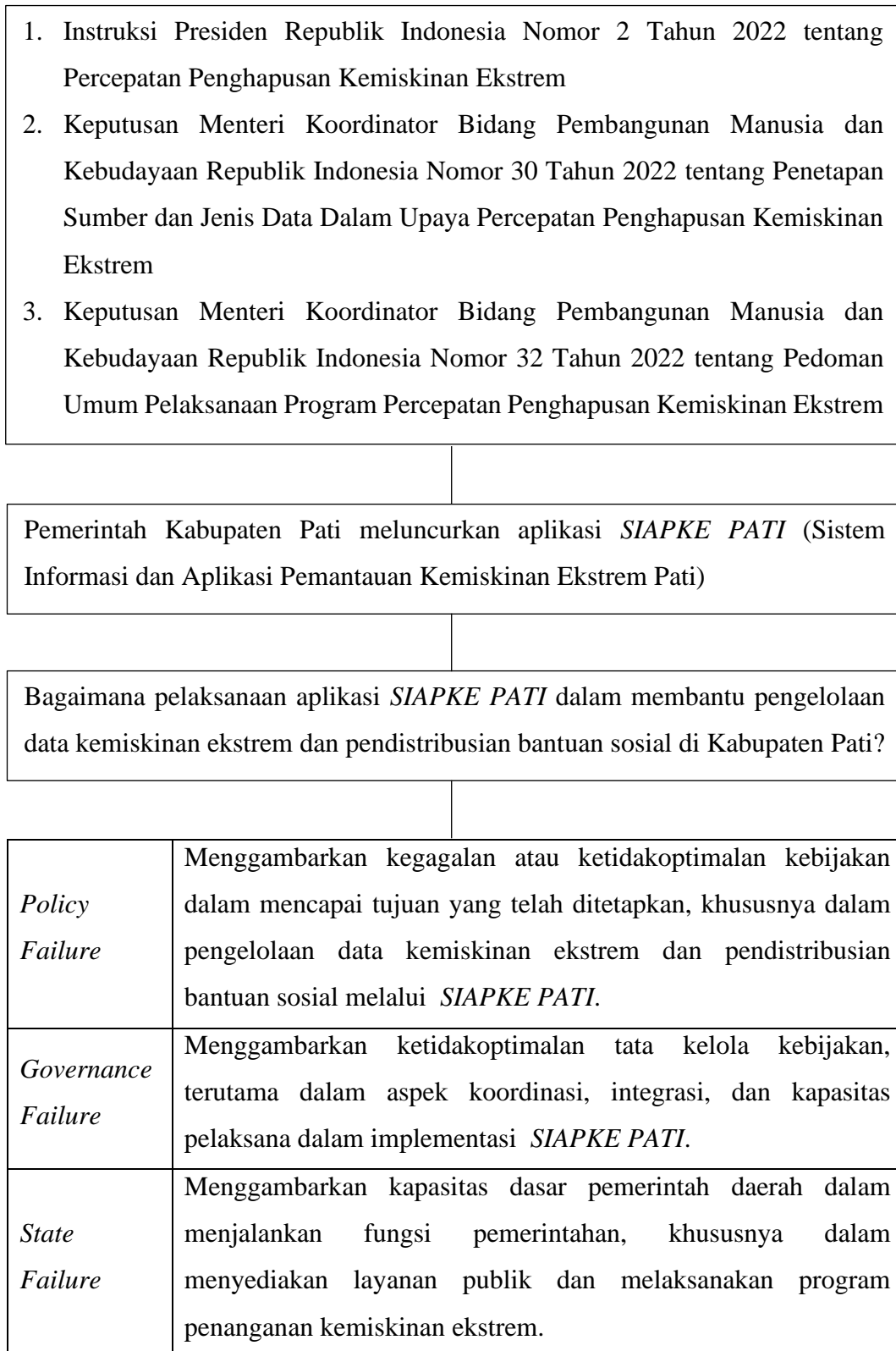
terhadap *outcome* kebijakan. *Governance failure* diukur melalui ketersediaan regulasi, kejelasan kelembagaan, koordinasi antar perangkat daerah, konsistensi implementasi, serta mekanisme pengawasan dan kapasitas sumber daya. *State failure* dipahami sebagai kondisi negara yang hadir namun tidak terintegrasi, yang dianalisis menggunakan konsep *fragmented state* dari Ronan Paddison, dengan indikator berupa tingkat integrasi kebijakan, keterkaitan antar aktor, keberlanjutan sistem, dan kesesuaian antara kebijakan daerah dan pusat. Dengan demikian, operasionalisasi konsep ini menunjukkan hubungan berjenjang antar dimensi, di mana ketidaktepatan instrumen (*policy failure*) berdampak pada lemahnya tata kelola (*governance failure*), yang selanjutnya menghasilkan kondisi kebijakan yang tidak terintegrasi (*fragmented state*).

Tabel 1.2 Operasional Konsep

No.	Aspek	Penjelasan	Indikator
1.	<i>Policy Failure</i>	Menggambarkan kegagalan atau ketidakefektifan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial melalui <i>SIAPKE PATI</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akurasi dan ketepatan data penerima bantuan 2. Tingkat pemanfaatan aplikasi oleh OPD 3. Ketepatan sasaran dan jenis bantuan 4. Ketepatan waktu penyaluran bantuan 5. Dampak kebijakan terhadap masyarakat penerima
2.	<i>Governance Failure</i>	Menggambarkan ketidakefektifan tata kelola kebijakan, terutama dalam aspek koordinasi, integrasi, dan kapasitas pelaksana dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas dan efektivitas koordinasi antar OPD

		implementasi <i>SIAPKE PATI</i> . Aspek ini menekankan bagaimana aktor dan instansi pemerintah berinteraksi serta mengelola kebijakan secara lintas sektor	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab 3. Integrasi dan sinkronisasi data antar instansi 4. Kapasitas SDM dalam penggunaan aplikasi 5. Konsistensi pemutakhiran data
3.	<i>State Failure</i>	Menggambarkan kapasitas dasar pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam menyediakan layanan publik dan melaksanakan program penanganan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks penelitian ini, aspek ini digunakan untuk melihat apakah pemerintah daerah memiliki kapasitas dasar yang memadai dalam menjalankan kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan kebijakan/program penanganan kemiskinan ekstrem 2. Kemampuan pemerintah menyediakan layanan dasar 3. Stabilitas kelembagaan dalam pelaksanaan program

Tabel 1.3 Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara menggali makna, pandangan, serta pengalaman dari individu atau kelompok terkait dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pemahaman pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI*, termasuk mekanisme kerja aplikasi, efektivitasnya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen, dan observasi langsung, sehingga menghasilkan deskripsi yang kaya dan mendetail tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2016).

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang dipilih karena mengimplementasikan aplikasi *SIAPKE PATI* untuk memantau dan menindaklanjuti bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, baik sebagai informan kunci maupun informan pendukung. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman dalam pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* serta program penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip keterwakilan aktor kebijakan, yaitu mencakup pihak perencana, pelaksana teknis, pengelola sistem, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mantan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati yang memiliki peran penting dalam proses awal perumusan dan pengembangan aplikasi *SIAPKE PATI*.
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati, yang berperan sebagai koordinator dalam perencanaan, pengelolaan data, serta pengembangan aplikasi *SIAPKE PATI*.
3. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati yang peran sebagai pelaksana teknis dalam pendataan, verifikasi, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrem.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati yang berperan dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional aplikasi *SIAPKE PATI*.
5. Masyarakat penerima bantuan dari 2 kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi yang dipilih untuk memperoleh perspektif langsung mengenai dampak kebijakan, ketepatan sasaran bantuan, serta pengalaman masyarakat dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.

Tabel 1.4 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Mantan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati	1
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati	2
3.	Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	1
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati	1
5.	Masyarakat	2
Jumlah		7

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk narasi, deskripsi, atau penjelasan mengenai fenomena tertentu yang dikaji secara mendalam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif pelaksanaan aplikasi *SIAPKE*

PATI dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan distribusi bantuan sosial di Kabupaten Pati.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu informan yang terlibat dalam pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa kelompok informan, seperti pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam kebijakan dan pengelolaan program pengentasan kemiskinan ekstrem, pengelola aplikasi *SIAPKE PATI*, dan masyarakat penerima bantuan. Observasi juga dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana aplikasi diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan memberikan konteks tambahan untuk penelitian ini. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen kebijakan dan laporan pemerintah yang berisi peraturan atau kebijakan terkait pengentasan

kemiskinan ekstrem yang diterapkan di Kabupaten Pati, serta laporan pelaksanaan program bantuan sosial yang relevan. Selain itu, data statistik yang mencakup jumlah penerima bantuan sosial, tingkat kemiskinan, dan indikator sosial-ekonomi lainnya di Kabupaten Pati juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Literatur terkait, seperti buku, artikel, dan penelitian terdahulu, juga digunakan untuk memberikan landasan teoritis yang lebih kuat dan konteks yang lebih luas mengenai pengelolaan bantuan sosial dan aplikasi *e-government*.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian. Berdasarkan Creswell (2018), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan berbagai metode yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara mendalam dan komprehensif. Teknik-teknik ini antara lain wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang masing-masing memberikan perspektif yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini. Sesuai dengan definisi Creswell (2018), wawancara adalah salah satu cara untuk menggali informasi langsung dari informan mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan mereka terkait fenomena yang diteliti.

Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi juga memberi kebebasan kepada informan untuk berbicara lebih luas tentang pengalaman mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, pengelola aplikasi *SIAPKE PATI*, dan masyarakat penerima bantuan untuk memahami bagaimana aplikasi ini digunakan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif pribadi dan pengalaman langsung dari berbagai pihak yang terlibat dalam program ini.

2. Observasi

Teknik kedua yang digunakan adalah observasi, di mana peneliti terlibat langsung dalam situasi yang sedang diamati untuk memahami konteks secara langsung. Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi dan dinamika dalam pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018), observasi ini tidak hanya mencatat perilaku, tetapi juga mencoba memahami makna yang terkandung di dalamnya. Peneliti mengamati kegiatan sehari-hari yang melibatkan pengelolaan bantuan sosial, mulai dari proses pendataan hingga distribusi bantuan kepada masyarakat penerima.

3. Analisis Dokumen

Selain wawancara dan observasi, analisis dokumen juga digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Dokumen yang dianalisis

meliputi kebijakan pemerintah terkait pengentasan kemiskinan, laporan pelaksanaan program bantuan sosial, dan data statistik mengenai tingkat kemiskinan serta penerima bantuan sosial di Kabupaten Pati. Menurut Creswell (2018), analisis dokumen merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk memahami lebih jauh konteks dan dinamika yang terkait dengan kebijakan dan implementasi program yang sedang diteliti. Analisis dokumen membantu peneliti dalam mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan langkah-langkah yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik analisis data ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang dianggap relevan untuk memahami kompleksitas fenomena sosial secara mendalam (Hardani, 2020).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan, pemilihan, dan penyederhanaan data yang diperoleh selama penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis untuk memisahkan informasi yang relevan dari yang tidak relevan. Proses ini melibatkan pemilahan data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan aplikasi *SIAPKE*

PATI dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan distribusi bantuan sosial. Reduksi data bertujuan untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dan bermakna yang digunakan dalam analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih terorganisir dan informatif. Penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Penyajian data ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan penting terkait efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI*.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dibuat berdasarkan hasil analisis data yang telah direduksi dan disajikan. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi untuk memastikan validitas dan konsistensi kesimpulan yang ditarik. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Hasil akhir dari proses ini adalah kesimpulan yang menggambarkan implementasi aplikasi *SIAPKE PATI* dan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui strategi validasi dan evaluasi yang mencakup triangulasi data, *member checking*, dan *audit trail* (Creswell, 2018). Triangulasi dilakukan dengan mengintegrasikan data dari wawancara, dokumen, dan observasi untuk memastikan konsistensi temuan. Validasi partisipan dilakukan melalui konfirmasi hasil dengan partisipan kunci, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan untuk menilai keabsahan hasil. Data dievaluasi berdasarkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui pengamatan mendalam dan refleksi peneliti, sementara transferabilitas dicapai melalui deskripsi kontekstual yang rinci. Dengan strategi ini, penelitian diharapkan menghasilkan data yang valid, terpercaya, dan relevan untuk memahami pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati.